



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR  
TAHUN 2012 - 2017**

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INDEX OF HUMAN  
DEVELOPMENT IN EAST JAVA YEAR 2012 - 2017

**SKRIPSI**

Oleh:

Rangga Syaiful Rahman

NIM. 140810101198

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR  
TAHUN 2012 - 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Rangga Syaiful Rahman

NIM. 140810101198

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggung jawab dan ungkapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Purwidiharjo dan Ibu Ida Erlina yang telah bekerja keras memberikan saya pendidikan yang terbaik dan selalu mendo'akan saya untuk selalu mendapatkan kebahagiaan.
2. Kakak ku tercinta Rohematul Jannah dan Zakki yang selalu mendo'akan, memotivasi, menjaga dan membantu saya untuk terus berjuang dalam mencapai kesuksesan.
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”.

(HR. Bukhari)

“Belajarlah untuk mengucap syukur dari hal-hal baik dihidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu”

(B.J. Habibi)

“Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu meminta air lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam”

(Emha Ainun Nadjib)

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER-FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Rangga Syaiful Rahman  
Nim : 140810101198  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : SDM (Sumber Daya Manusia)  
Judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
INDEKS PEMBANGUAN MANUSIA DI JAWA TIMUR  
TAHUN 2012 - 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 17 Februari 2020  
Yang menyatakan,

Rangga Syaiful Rahman  
NIM. 140810101198

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUAN MANUSIA DI JAWA TIMUR TAHUN 2012 - 2017**

Oleh :

Rangga Syaiful Rahman

NIM. 140810101198

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.E., M.Sc.

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Anifatul Hanim, M.Si

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks  
Pembangunan Manusia Di Jawa Timur Tahun 2012 -  
2017  
Nama Mahasiswa : Ranga Syaiful Rahman  
NIM : 140810101198  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : SDM (Sumber Daya Manusia)  
Disetujui Tanggal : 13 November 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing 2

**Prof. Dr. Moh Saleh, M.Sc.**  
**NIP. 195608311984031002**

**Dra. Anifatul Hanim, M. Si.**  
**NIP. 196507301991032001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1-Ekonomi Pembangunan

**Dr.Herman Cahyo D, SE.MP.**  
**NIP. 197207131999031001**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama Mahasiswa : Rangga Syaiful Rahman**

**NIM : 140810101198**

**Jurusan : Ekonomi Pembangunan**

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. : (.....)**  
**NIP. 196004121987021001**

**Sekretaris : Dr. Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E. : (.....)**  
**NIP. 197804142001122003**

**Anggota : Dra. Dr. Zainuri, M.Si. : (.....)**  
**NIP. 196403251989021001**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Jember

**Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.**

**NIP. 197107271995121001**

*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di*

*Jawa Timur Tahun 2012-2017*

**RANGGA SYAIFUL RAHMAN**

**Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember**

**ABSTRAK**

Indonesia termasuk negara berkembang menuju ke negara maju. Dimana untuk menjadi negara maju diperlukan pembangunan yang kompleks, dari pembangunan fisik hingga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan tol dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kemajuan perekonomian di sebuah negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk (1) Mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, (2) Mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, (3) Mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) berupa data Indeks Pembangunan Manusia, data pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, (2) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, (3) Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

*Kata Kunci : Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia*

*Analysis of Factors Affecting Human Development Index in East Java*

2012-2017

**RANGGA SYAIFUL RAHMAN**

**Department of Economics and Development Study**

**Faculty of Economics and Bussiness, University of Jember**

*Indonesia is a developing country that is heading towards developed countries. Where to become a developed country requires complex development, from physical development to non-physical development. Physical development such as the construction of toll roads and facilities that can support economic progress in a country. The purpose of this study is to (1) Know how much influence government spending on the health sector on the Human Development Index in East Java Province, (2) Know how much influence government spending on the education sector on the Human Development Index in East Java. Java Province, (3) Know how much influence inflation affects the Human Development Index in East Java Province. The data in this study were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) in the form of Human Development Index data, data on government spending in the education sector, the health sector, and economic growth in East Java. The analytical method used in this study is panel data regression analysis. Based on the results of multiple linear regression testing shows that: (1) government health sector spending has a significant effect on the Human Development Index in East Java Province, (2) government education sector spending has a significant influence on the Human Development Index in East Java Province, (3) Effect inflation is not significant to the Human Development Index in East Java Province.*

*Keywords: Health and education sector government expenditure, inflation, Human Development Index*

## RINGKASAN

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur Tahun 2012-2017:** Rangga Syaiful Rahman, 140810101198: 2020: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan adalah salah satu syarat dalam kelangsungan hidup di suatu negara. Pembangunan menurut Rustiadi et al (2011) dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu proses pembangunan. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya (Cliff et al, 2015). Dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas baik akan mempermudah negara dalam pembangunan nasional agar perekonomian negara maju dan sejahtera.

Indonesia termasuk negara berkembang menuju ke negara maju. Dimana untuk menjadi negara maju diperlukan pembangunan yang kompleks, dari pembangunan fisik hingga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan tol dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kemajuan perekonomian di sebuah negara tersebut. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pembangunan sumber daya manusia dimana sumber daya manusia merupakan motor atau penggerak yang dapat mempercepat perkembangan di sebuah negara. Dan justru pembangunan sumber daya manusia ini harus dijadikan fokus demi kemajuan indonesia ke depan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Eksplanatory dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder. Cakupan penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur yaitu 38 Kabupaten/Kota, dengan series data 5 tahun dari 2012 hingga tahun 2017. Data sekunder adalah data yang tersedia dan dapat diperoleh dari instansi yang terkait. Data dalam penelitian ini

diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) berupa data Indeks Pembangunan Manusia, data pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel.

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, (2) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, (3) Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) Menanggulangi masalah Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal yang perlu dilakukan. Perlunya kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan di setiap daerahnya. (2) Lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar semua variabel bebas bias meningkat pula, yang nantinya akan meningkatkan pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia. (3) Dikarenakan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), maka pemerintah diharapkan tetap meneruskan kebijakan memberikan bantuan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah atau miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

## PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur Tahun 2012-2017”. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW sebagai tauladan umat manusia di dunia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini mampu terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Moh Saleh, M.Sc., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu, petunjuk, saran, motivasi dan koreksi hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Dra. Anifatul Hanim, M.Si., selaku Pembimbing II yang berkenan memberikan saran, arahan, pikiran dan bimbingan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Dr. Riniati, M.P. selaku ketua Jurusan S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Dr Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu sampai akhirnya studi ini dapat terselesaikan.

7. Kedua Orangtuaku tercinta, Bapak Purwidiharjo dan Ibu Ida Erlina terimakasih atas semua kasih sayang, dukungan, motivasi, doa dan semangat yang telah diberikan kepada saya. Sehingga saya mampu menjadi pribadi yang lebih baik, terimakasih atas semua persetujuan keluarga, sehingga saya mampu menentukan pilihan hidup dan salam cinta untuk kedua orangtua saya yang telah memberikan semua yang dimilikinya untuk saya.
8. Kakaku tercinta Rohematul Jannah dan Zakki yang telah menjadi kakak terbaik yang selalu memberikan dorongan motivasi, semangat dan pengalaman kalian untuk bekal ilmu dikehidupan saya kelak.
9. Sahabat tersayang Diah Ayu Rosmita yang menemani, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember angkatan 2014.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan bagi pembaca.

Jember, 17 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

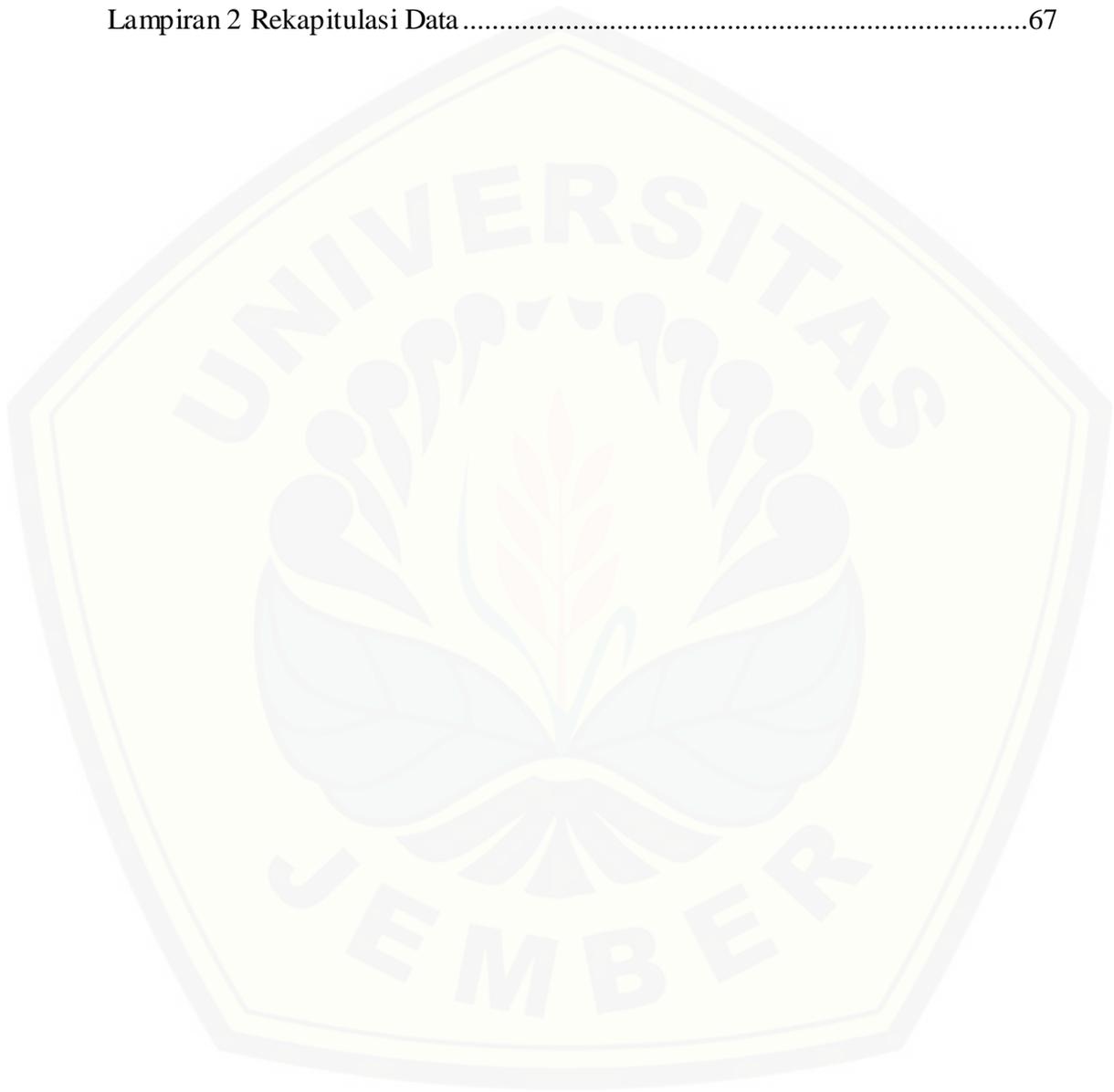
HALAMAN JUDUL .....	v
HALAMAN SAMPUL .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	x
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	x
HALAMAN PENGESAHAN .....	x
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
RINGKASAN .....	xiii
PRAKATA .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi .....	8
2.1.2 Teori Pembangunan Rostow Dan Musgrave.....	9
2.1.3 Teori Pertumbuhan Adam Smith.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.4 Teori Pertumbuhan Endogen.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	10

2.1.6	Komponen – komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	14
2.1.7	Inflasi.....	19
2.1.8	Teori Pengeluaran Pemerintah .....	23
2.1.9	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia .....	26
2.1.10	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	27
2.1.11	Hubungan inflasi terhadap indeks pembangunan manusia .....	28
<b>2.2</b>	<b>Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>29</b>
<b>2.3</b>	<b>Kerangka Konseptual:.....</b>	<b>31</b>
2.4	Hipotesis Penelitian.....	32
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>31</b>
<b>3.1</b>	<b>Rancangan Penelitian .....</b>	<b>31</b>
3.1.1	Jenis Penelitian.....	31
3.1.2	Waktu Tempat Penelitian.....	31
3.1.3	Jenis dan Sumber Data .....	31
<b>3.2</b>	<b>Metode Analisis Data .....</b>	<b>31</b>
3.2.1	Analisis Data Panel .....	31
3.2.2	Model Regresi Data Panel.....	33
3.2.3	Uji Statistik.....	33
3.2.4	Uji Asumsi Klasik .....	35
<b>3.3</b>	<b>Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum. ....</b>	<b>39</b>
4.1.1	Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur .....	39

4.2 Hasil Analisis Data .....	41
4.2.1 Hasil Chow Test dan Hausman Test .....	41
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel .....	42
4.2.3 Uji Statistik .....	44
<b>Tabel 4.4 Hasil Uji F .....</b>	<b>45</b>
4.2.4 Uji Asumsi Klasik .....	47
4.3 Pembahasan .....	50
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur .....	50
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur .....	52
4.3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur .....	53
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Hasil Analisis Data .....	61
Lampiran 2 Rekapitulasi Data .....	67



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah salah satu syarat dalam kelangsungan hidup di suatu negara. Pembangunan menurut Rustiadi *et al* (2011) dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu proses pembangunan. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya (Cliff *et al*, 2015). Dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas baik akan mempermudah negara dalam pembangunan nasional agar perekonomian negara maju dan sejahtera.

Indonesia termasuk negara berkembang menuju ke negara maju. Dimana untuk menjadi negara maju diperlukan pembangunan yang kompleks, dari pembangunan fisik hingga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan tol dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kemajuan perekonomian di sebuah negara tersebut. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pembangunan sumber daya manusia dimana sumber daya manusia merupakan motor atau penggerak yang dapat mempercepat perkembangan di sebuah negara. Dan justru pembangunan sumber daya manusia ini harus dijadikan fokus demi kemajuan indonesia ke depan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Wikipedia, 2018) IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan manusia (IPM) mencapai 70,81.

Angka ini meningkat sebesar 0,63 atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016 (BPS, 2018). IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak (Ayunanda, 2013).

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan (BPS, 2015). Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. IPM mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengetahuan dan berketrampilan, serta akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Tingkat Pembangunan manusia yang sangat tinggi dapat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitanya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Nyoman *et al*, 2014). Pembangunan sumber daya manusia berkaitan dengan sejumlah data yang dikeluarkan saat pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di masa mendatang. Pembangunan manusia mempunyai 4 unsur penting yaitu peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, pemberdayaan manusia, melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut yang tertuang dalam Indeks Pembangunan Manusia (Munawwaroh, 2013:137).

Pendidikan dan kesehatan adalah faktor penting dalam perkembangan manusia sekaligus merupakan penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan adalah inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan, kedua hal tersebut merupakan pokok untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti pembangunan. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator

angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (Zulfikar, 2017).

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota atau 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 37.476.757 jiwa pada waktu dilakukan sensus penduduk tahun 2010. (BPS Jatim, 2010). Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tentunya PEMPROV JATIM memiliki tantangan tersendiri dalam hal meningkatkan pembangunan IPM.

Kesehatan menjadi salah satu faktor yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Menurut Zulfikar (2017), indikator angka harapan hidup digunakan untuk mengukur kesehatan yang merupakan penentu Indeks Pembangunan Manusia. Tabel 1.1. di bawah ini menunjukkan Angka Harapan Hidup sebagai salah satu indikator kesehatan dalam segi pembangunan IPM.

Tabel 1.1 Angka Harapan Hidup di Jawa Timur tahun 2012-2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Rata-rata	Peningkatan
2012	68,25	72,13	70,19	-
2013	68,45	72,33	70,39	0,20
2014	68,56	72,44	70,5	0,11
2015	68,79	72,67	70,73	0,23
2016	68,8	72,68	70,74	0,01
2017	68,82	72,7	70,76	0,02

Sumber : BPS Jatim, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan angka harapan hidup di Jawa Timur tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,23, sedangkan tahun 2016 dan 2017 peningkatan AHH tidak begitu signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Jawa Timur, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan, dalam hal ini diharapkan pemerintah Jawa Timur lebih serius

mengucurkan dana untuk kesehatan sehingga dapat mendongkrak kualitas pelayanan kesehatan demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain kesehatan, faktor pendidikan juga menjadi penunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Zulfikar (2017) menyebutkan bahwa indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan juga merupakan penentu Indeks Pembangunan Manusia. Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan perkembangan Angka Melek Huruf masyarakat di Jawa Timur tahun 2012-2017.

Tabel 1.2 Angka Melek Huruf Jawa Timur 2012-2017

Tahun	Laki-laki	Peningkatan
2012	89,28	-
2013	90,49	1,21
2014	92,23	1,74
2015	92,30	0,07
2016	91,59	(0,71)
2017	91,82	0,23

Sumber : BPS Jatim, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 AMH Jatim mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat dari perkembangan sejak tahun 2012, AMH tahun 2012 tergolong rendah yakni sebesar 0,23 dari tahun sebelumnya. Untuk mendongkrak IPM di Jawa Timur, hal ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengangkat Angka Melek Huruf di Jawa Timur. Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberantas buta akasara yakni program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) atau kelompok belajar (kejar) paket A. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan Angka Melek Huruf di Jawa Timur.

Perkembangan IPM selain dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesehatan, inflasi juga dapat menjadi pergerakan IPM. Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Yang

pertama adalah “kenaikan harga secara umum” dan yang kedua adalah “terus-menerus”. Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi (BI, 2009). Tabel 1.3 di bawah ini menunjukkan perkembangan laju inflasi Jawa Timur tahun 2012-2017

Tabel 1.3. Laju Inflasi Jawa Timur

Tahun	Inflasi (%)
2012	0,37
2013	0,62
2014	0,63
2015	0,26
2016	0,23
2017	0,33

Sumber : Bank Indonesia, 2018

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa laju inflasi di Jawa Timur mengalami tingkat fluktuasi. Laju inflasi tertinggi yakni pada tahun 2014 sebesar 0,63 yang disebabkan karena kenaikan harga barang dipasaran, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Sehingga inflasi juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang secara langsung juga akan berdampak terhadap IPM.

Pemerintah harus bisa dalam mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia misalnya realisasi belanja daerah untuk bidang kesehatan dan pendidikan serta menekan angka inflasi. Selain dari sisi anggaran, kondisi perekonomian suatu daerah juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Perekonomian yang baik dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi (Arifin, 2015).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya faktor pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi indikator pembangunan manusia maupun perekonomian, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kembali Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya adalah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan serta inflasi. Dengan variabel tersebut maka peneliti menulis judul ‘Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur’.

### **1.2 Rumusan Masalah :**

Pokok permasalahan yang terjadi berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2012 - 2017?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2012 - 2017?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2012 – 2017?

### **1.3 Tujuan Penelitian:**

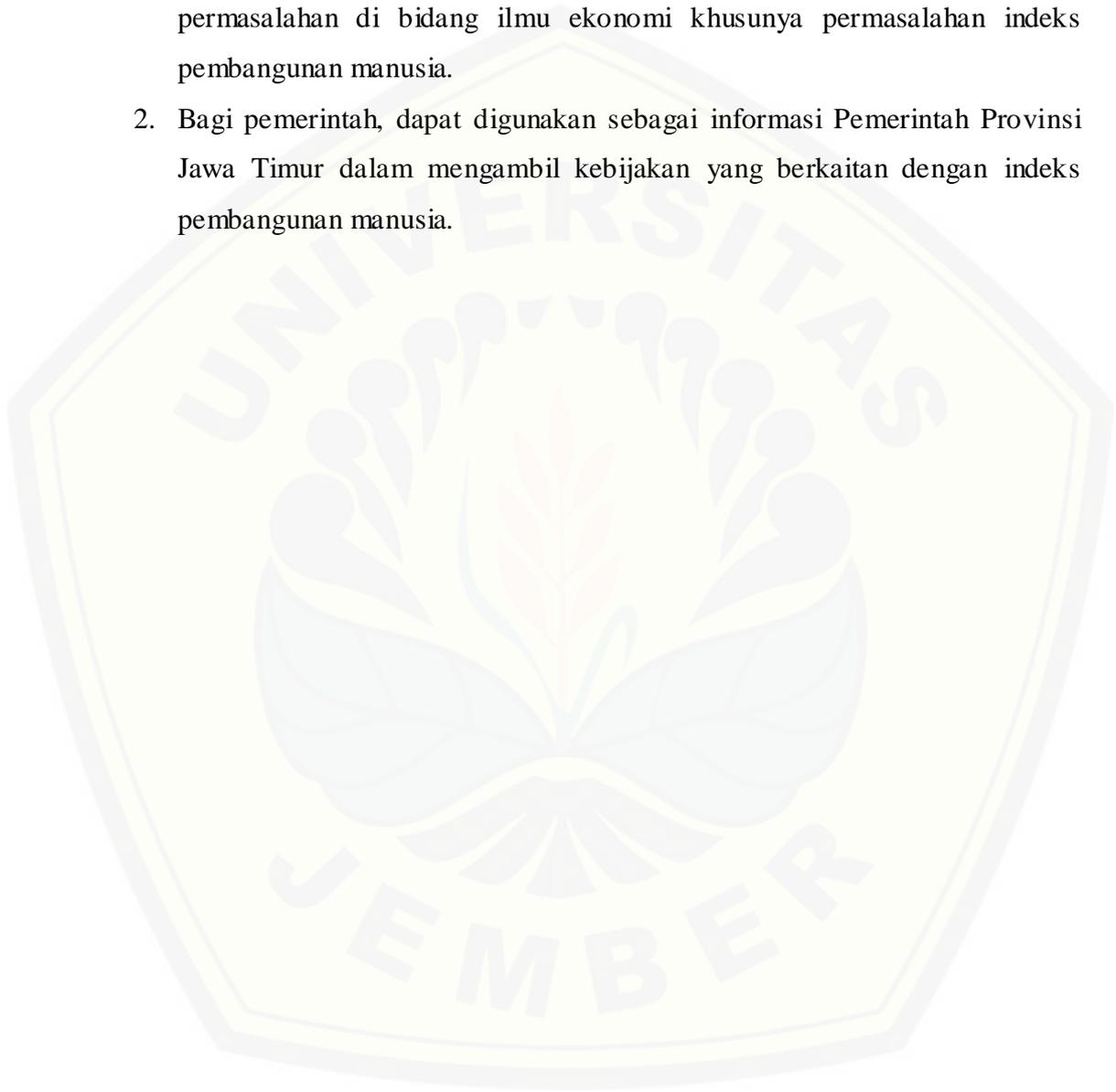
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2012 - 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2012 – 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2012 – 2017.

#### 1.4 Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan dan informasi tentang permasalahan di bidang ilmu ekonomi khususnya permasalahan indeks pembangunan manusia.
2. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (Ayunanda, 2013). Secara khusus, Indek Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu; angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Menurut Todaro (2004:20) pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya pembangunan mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok – kelompok sosial dalam sistem tersebut.

Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan adanya perubahan – perubahan ekonomi disamping itu sudah tentu terjadi kenaikan output. Pembangunan selalu di ikuti oleh pertumbuhan akan tetapi dalam pertumbuhan, belum tentu mencakup unsur pembangunan, maka pertumbuhan

ekonomi yang terus menerus dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari keberlangsungan pembangunan (Adisasmita,2011:24).

Pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat telah, melalui kombinasi tertentu dalam proses sosial, ekonomi, dan lembaga memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik tersebut, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut (Todaro dan Smith, 2011:27) :

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang – barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai – nilai budaya dan kemiskinan. Secara keseluruhan, hal – hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well – being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap orang atau negara – negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai – nilai kemanusiaan mereka.

#### 2.1.2 Teori Pembangunan Rostow Dan Musgrave

Dimana mereka menghubungkan pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional yang relatif besar. Tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Selanjutnya tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu pula posisi investasi pihak swasta juga meningkat.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktifitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Mangkoesobroto 1998 dalam M. Taufiq, 2016 )

### 2.1.3 Teori *Human Capital*

*Human Capital* diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individual tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di dalam maupun luar perusahaan (Stewart 1997 dalam Totanan 2004). Menurut Malhotra dan Bontis (dalam Rachmawati dan Wulani, 2004), Human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Pembentukan nilai tambah dikontribusikan oleh human capital dalam menjalankan tugasnya akan memberikan Sustainable Revenue di masa yang akan datang bagi suatu perusahaan tersebut. Human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari, melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim, nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa: pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan serta perubahan budaya manajemen (Mayo 2000 dalam Rachmawati et al.2004). Andrew Mayo dalam Ongkodihardjo (2008:40) mendefinisikan “human capital sebagai kombinasi warisan genetik, pendidikan, pengalaman, dan perilaku tentang hidup dan bisnis”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa human

capital merupakan segala sesuatu mengenai manusia dengan segala kapabilitas yang dimilikinya, sehingga dapat menciptakan nilai bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Menurut Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Malthus mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan angkatan kerja cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas angkatan kerja. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam permasalahan pengangguran. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan angkatan kerja meningkat sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas” (Mulyadi, 2014:5).

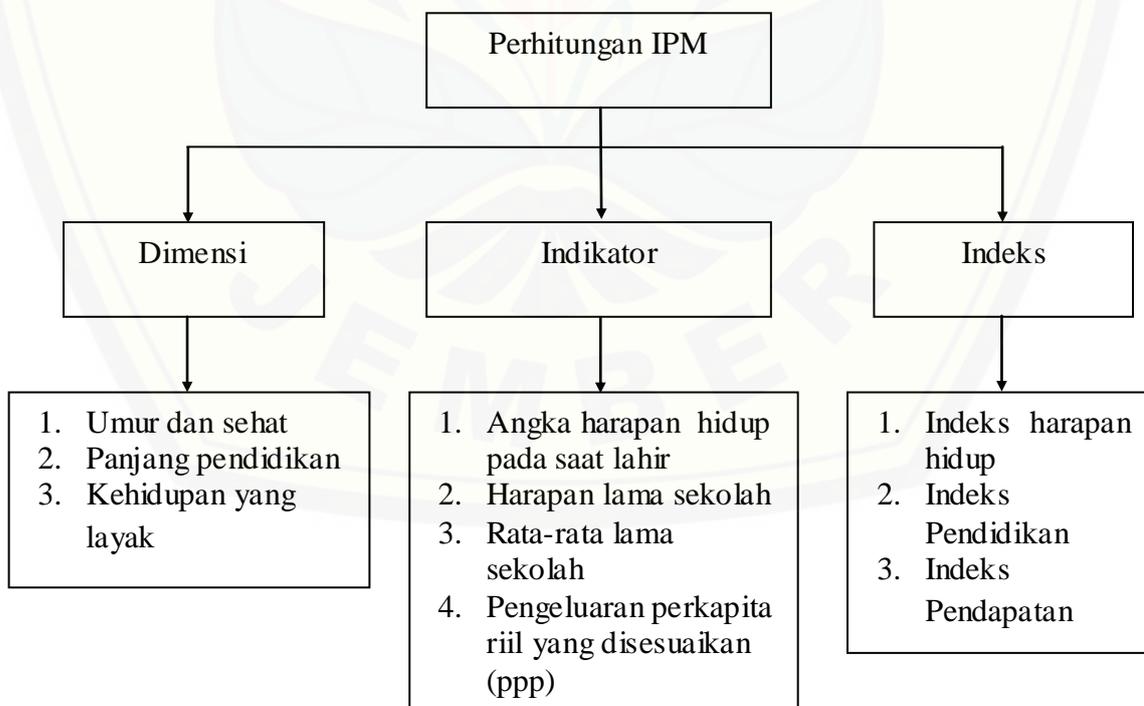
Apabila ditelaah lebih dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas, hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi bertahan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berkualitas (Mulyadi, 2014:7).

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (Ayunanda,

2013). Secara khusus, Indek Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu; angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat perbandingan antara Negara maju dan Negara berkembang ataupun negara terbelakang dilihat melalui kualitas mutu sumber daya manusianya. Selain itu IPM juga adalah alternatif pengukuran tingkat pembangunan di banding alat ukur lainnya dan juga IPM digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi Negara terhadap kualitas hidup. IPM merupakan gabungan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli sehingga dapat menghasilkan kualitas hidup bagi sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar (Cristina, 2011: 34).



Sumber: data diolah melalui BPS Jawa Timur, 2019

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya, dalam mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Indeks pembangunan manusia dapat mengetahui kondisi pembangunan di suatu daerah dengan alasan;

1. Indeks pembangunan manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.
2. Indeks pembangunan manusia menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
3. Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja Konsep pembangunan fokus pada pembangunan manusia yang dilakukan secara seimbang. Seimbang antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan dalam artian bahwa pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan kemampuan manusia saja, misalnya kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, umur yang lebih panjang ataupun memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Namun juga harus memperhatikan bagaimana manusia memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang dapat meningkatkan hidup ketingkat yang lebih baik, misalnya dengan memanfaatkan kemampuannya untuk bekerja. IPM memiliki tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan opsional mudah untuk dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, artinya IPM mengukur suatu capaian dalam pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (BPS, 2019).

Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan memiliki tujuan penting, diantaranya:

1. Membangun indikator yang dapat mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
2. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut tetap sederhana.
3. Membantu satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
4. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

#### 2.1.5 Komponen – komponen Indeks Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

##### 1. Indeks Harapan Hidup

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, produktivitas diukur dari pekerjaan, secara sosial diukur dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup diri, orang lain ataupun masyarakat (Soekidjo, 2008). Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan kesehatan di suatu negara maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di Negara tersebut (Beik, 2016). Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan

signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Suparno, 2014).

Pada indeks harapan hidup terdapat komponen indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan rata-rata dari perkiraan seberapa banyak tahun yang dapat ditempuh oleh individu. Pendekatan tak langsung biasa digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Menurut suprano (2014) mengatakan keberhasilan pembangunan adalah cita-cita suatu bangsa yang terlihat dari peningkatan taraf hidup dan Angka Harapan Hidup (AHH). Namun peningkatan AHH ini dapat mengakibatkan terjadinya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan akibat meningkatnya jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif.

Perubahan struktur demografi ini diakibatkan oleh peningkatan populasi lanjut usia (lansia) dengan menurunnya angka kematian serta penurunan jumlah kelahiran. Keberhasilan pembangunan adalah cita-cita suatu bangsa yang terlihat dari peningkatan taraf hidup dan Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH).

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011-2013 yaitu:

- a) Pertolongan persalinan oleh tenaga kerja
- b) Rata-rata lama sakit (hari)
- c) Angka kesakitan (%)
- d) Persentase pemberian ASI
- e) Rata-rata lama Balita menyusui (bulan)

## 2. Indeks Pendidikan

Perspektif ekonomi, pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan dimasa mendatang, baik kepada masyarakat atau negara, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan (Ketut, 2016).

Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi. Perspektif ekonomi, pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan dimasa mendatang, baik kepada masyarakat atau Negara, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia, investasi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *private investment* dan *public investment* (Todaro dan Winarti, 2014: 18).

Pengukuran dimensi pengetahuan penduduk menggunakan dua indikator (BPS,2018). Kedua indikator tersebut, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) (BPS,2018).

Data indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, angka harapan lama sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren tersebut diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Angka harapan lama sekolah

didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang (BPS, 2018).

Indikator Pendidikan menjadi salah satu aspek dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*) yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Dalam komposit IPM, aspek pendidikan diukur dengan menggunakan dua indikator yakni;

a) Angka Melek Hidup (AMH)

Angka melek huruf merupakan salah satu parameter yang paling mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Buta huruf merupakan ketidakmampuan dalam membaca dan menulis yang dapat menempatkan individu tersebut dalam ketertinggalan dari individu lainnya. Penduduk usia 15 tahun keatas (melek huruf diukur melalui kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya). Indeks pembangunan manusia dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan tingkat kesejahteraan dan menentukan tingkat umur harapan hidup. Adapun cara yang digunakan pemerintah dalam memberantas angkamelek huruf dengan cara mendidik penduduk buta huruf dengan prioritas usia 10-44 tahun, agar dapat membaca dan juga menulis.

b) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Pendidikan hendaknya dipandang dapat mengakomodir masyarakat agar suatu negara memiliki manusia yang berkualitas. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar evaluasi dan peningkatan pendidikan di setiap negara secara berkesinambungan (Ketut, 2016).

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standart United Nations Development Programme (UNDP) adalah minimal 0 tahun sampai 15 tahun. Rata – rata lama sekolah dapat dihitung dengan tiga variabel, yakni partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.

### 3. Indeks Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto(PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) berbasis Metode Rao (BPS, 2018).

Secara umum teknis penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari data Susenas.
- b) Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan.
- c) Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012.
- d) Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP).
- e) Menghitung pengeluaran per kapita setahun disesuaikan dengan membagirata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012 dan Paritas Daya Beli Perhitungan paritas (BPS, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam periode

tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri, misalnya kenaikan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama (Arsyad, 2010:96).

Kuznet dalam (Jhingan, 2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institutional, dan ideologis yang diperlukan. Dalam analisisnya, Kuznet mengemukakan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang dimanifestasikan dalam proses pertumbuhan oleh semua negara maju. Sumber daya manusia sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga di pengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

#### 2.1.6 Inflasi

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga (BI, 2009). Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kestabilan inflasi merupakan prasarat bagi pertumbuhan ekonomi

dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan berusaha. Pengalaman empiris membuktikan inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat untuk berkonsumsi dan investasi, sehingga pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Yang pertama adalah “kenaikan harga secara umum” dan yang kedua adalah “terus-menerus”. Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas barang dan jasa tertentu. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Kata kunci kedua adalah terus menerus, kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya, menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan “masalah kronis” ekonomi.

Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut (BI, 2019).

#### 1. Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi

Dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun ekspektasi. Faktor yang juga menyebabkan inflasi tersebut dapat merupakan gabungan dari ketiga faktor tersebut.

a) Inflasi Permintaan

Inflasi permintaan adalah inflasi yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul apabila permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi output yang tersedia. Yang dimaksud dengan permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian. Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dan diinvestasikan tersebut digambarkan oleh Produksi Domestik Bruto (PDB) perekonomian yang bersangkutan. Sementara itu, yang dimaksud dengan penawaran agregat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk dapat memenuhi permintaan agregat. Perbedaan antara permintaan dan penawaran agregat disebut output gap. Apabila permintaan agregat lebih besar dibanding potensi output yang tersedia, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, output gap dapat dipergunakan sebagai indikator apakah terdapat tekanan terhadap laju inflasi. Namun, perlu dicatat bahwa output gap tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi ekonomi yang normal. Dalam keadaan tertentu, output gap tidak dapat dipergunakan sebagai indikator yang baik. Misalnya, dalam keadaan ekonomi setelah terjadinya krisis, atau suatu perekonomian yang mengalami stagnasi yang disertai inflasi (stagflasi).

b) Inflasi Penawaran

Faktor kedua yang menyebabkan inflasi adalah faktor penawaran, dan inflasi yang ditimbulkan sering disebut sebagai *cost push* atau *supply shock inflation*. Jenis inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Termasuk dalam jenis inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang (termasuk barang-barang yang harus diimpor), serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Contoh : adanya kenaikan harga minyak dunia, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Di samping itu, inflasi juga disebabkan oleh

faktor alam misalnya, gagalnya panen atau panen yang berlebih, faktor faktor sosial ekonomi, misalnya, adanya masalah atau hambatan dalam distribusi suatu barang, atau faktor-faktor yang timbul karena kebijakan tertentu, misalnya, karena adanya kebijakan tarif, pajak, pembatasan impor, atau kebijakan lainnya.

c) Inflasi Ekspektasi

Faktor ketiga yang menyebabkan inflasi adalah ekspektasi. Faktor yang menyebabkan inflasi tidak hanya oleh faktor permintaan dan penawaran. Inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi para pelaku ekonomi atau yang sering disebut inflasi ekspektasi (Gordon, 2007). Inflasi ekspektasi sangat berperan dalam pembentukan harga dan juga upah tenaga kerja. Pembentukan inflasi ekspektasi yang bersifat adaptif (*backward expectation*) ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang antara lain sebagai berikut: i) inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, ii) inflasi penawaran yang besar atau sering terjadi, dan iii) inflasi penawaran yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Untuk mengurangi dampak ekspektasi inflasi adaptif ini perlu peningkatan kredibilitas (kebijakan) bank sentral. Bank sentral yang kredibel dapat menurunkan ekspektasi inflasi dan mendorong ekspektasi inflasi berdasarkan kondisi ekonomi ke depan (*forward looking*)

2. Dampak Inflasi

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, misalnya, pegawai negeri, adalah kelompok masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap tersebut akan menderita karena secara riil pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil. Sementara kelompok

masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya inflasi.

Ketidakpastian besarnya laju inflasi juga dapat mengakibatkan semakin seriusnya beban atau bahaya inflasi. Laju inflasi yang terlalu berfluktuasi akan menimbulkan distorsi terhadap tingkat harga. Dalam sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah tangga maupun dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu perekonomian. Contoh : apabila kenaikan harga tahu lebih besar dibandingkan harga tempe, maka hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memproduksi tahu dan mendorong orang akan lebih banyak mengkonsumsi tempe (dengan asumsi hal-hal lain tetap atau dalam istilah ekonominya *ceteris paribus*). Kenaikan harga-harga saham di pasar modal yang secara relatif lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya merupakan tanda-tanda membaiknya prospek dunia usaha, yang lebih lanjut berarti adanya kesempatan untuk melakukan berbagai investasi yang menguntungkan. Harga relatif (bukan harga satu persatu barang dan jasa) merupakan sinyal yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil berbagai keputusan yang strategis.

Apabila laju inflasi bergejolak (sangat berfluktuasi) dan tidak menentu, maka harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya karena keadaan tersebut akan mendistorsi sinyal ekonomi yang sangat penting dalam suatu perekonomian, yaitu harga. Perubahan dan variasi harga relatif yang timbul karena adanya ketidakpastian harga (inflasi) dapat mengakibatkan masyarakat (individu dan dunia usaha) memboroskan sumber-sumber daya ekonomi untuk mencari harga yang berbeda-beda.

#### 2.1.7 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori

mikro. Pada teroi makro, pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

a) Teori Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

b) Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama

disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

c) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno dalam Pratowo) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk

membayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek (Patta, 2012: 32).

#### 2.1.8 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia

Pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual.

Becker dalam Saputri (2014: 25) menyatakan bahwa salah satu cara untuk berinvestasi dalam *human capital* adalah dengan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Di negara-negara Barat, pendapatan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan daripada kekuatan saat ini, namun pada masa lampau dan sampai sekarang, kekuatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan apalagi kesehatan emosional dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam menentukan pendapatan di seluruh dunia.

Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, maka kemungkinan besar masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada

jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan dalam Suparno, 2015: 5). Samoelson dan Nordhaus (1994: 554), pemberantasan penyakit serta perbaikan kesehatan dan gizi, keduanya itu untuk membuat orang lebih bahagia dan menjadikan mereka pekerja produktif. Karena itu jangan menganggap klinik-klinik kesehatan dan proyek saluran air kotor sebagai suatu kemewahan, hal itu merupakan modal sosial yang sangat berguna. Meier, et al (Winarti, 2014: 41), suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.

#### 2.1.9 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank dalam Winarti, 2014: 11). Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014: 21). Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah (Bastias dalam Syam, 2014: 21).

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, et al dalam Winarti, 2014: 41).

#### 2.1.10 Hubungan inflasi terhadap indeks pembangunan manusia

Inflasi adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok rumah tangga secara terus menerus. Data kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kantor-kantor cabangnya ada di daerah provinsi sampai ke kecamatan. Indikator inflasi ini dibuat oleh para ahli yang disebut dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Karena inflasi meningkat, maka tingkat kesejahteraan menjadi terganggu, yakni daya beli masyarakat menurun. Kesejahteraan masyarakat ini diukur dengan indeks kesejahteraan rakyat yang dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Penyebab inflasi itu adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan memproduksi. Jika ini yang terjadi, inflasi ini disebut datang dari sisi permintaan (*demand pull inflation*). Inflasi juga dapat terjadi atau datang dari sisi penawaran, yakni kenaikan biaya produksi sehingga harga naik. Jika ini yang terjadi maka inflasi ini disebut *cost push inflation*. (Sukirno, 2006). Kestabilan inflasi merupakan prasarat bagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan berusaha. Pengalaman empiris membuktikan inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat untuk berkonsumsi dan investasi, sehingga pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Agus H Fahmi pada tahun 2018. Judul penelitian yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua Tahun 2011-2015. Penelitian ini meneliti tentang pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Provinsi Papua. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Hasil analisis dari penelitian ini variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM adalah APBD untuk pendidikan dan PDRB, variabel rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan APBD untuk kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan IPM melalui PDRB, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan memaksimalkan APBD 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan sesuai dengan amanat UUD yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan IPM di Provinsi Papua.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Merang Kanang *et al* 2016 dengan judul Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor pengeluaran pemerintah pendidikan (X1) secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah (X2) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendorong indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian dari belanja pemerintah di sektor pendidikan (X1) efek dominan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Vicky Kresno pada tahun 2016 dengan judul “ Analisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh variable anggaran belanja pemerintah disektor

pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia, di wilayah Eks Karesidenan Besuki tahun 2006 -2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap IPM pada nilai  $\alpha$  sebesar 5 persen. Hal ini disebabkan karena Belanja pemerintah sektor pendidikan yang hakikatnya adalah investasi di bidang *human capital*, merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung dapat dirasakan saat ini juga. Variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM pada nilai  $\alpha$  sebesar 5 persen.

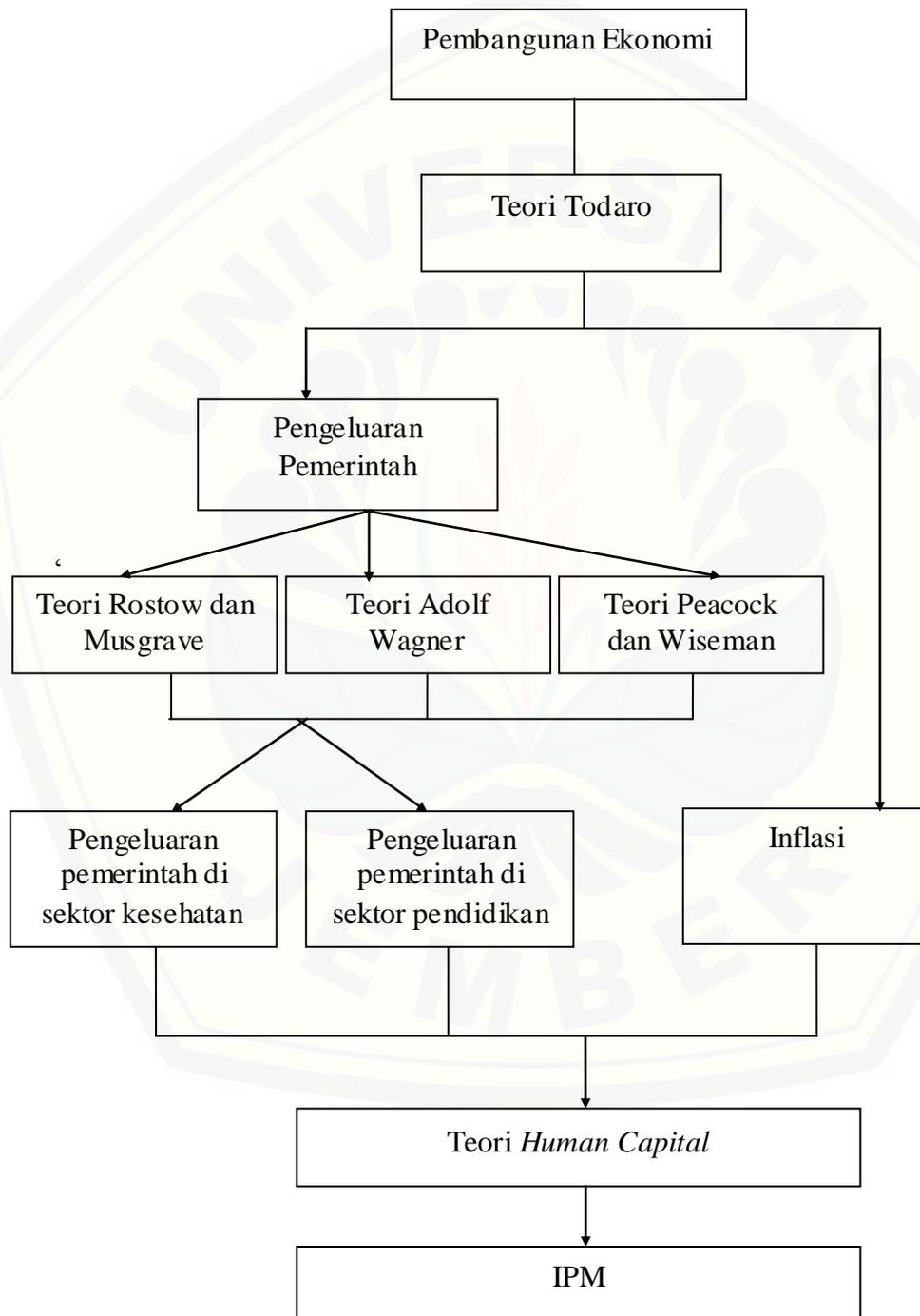
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Objek Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil dan Kesimpulan Penelitian
Agus H Fahmi (2018)	Provinsi Papua	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia	Metode data panel	APBD pendidikan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. APBD kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.
Merang <i>et al</i> (2016)	Kutai Timur	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia	Metode kuantitatif Regresi linier berganda	Sektor pengeluaran pemerintah pendidikan secara signifikan mempengaruhi IPM. Sektor pengeluaran pemerintah kesehatan tidak signifikan mempengaruhi IPM di Kabupaten Kutai Timur.
Vicky (2016)	Eks Karesidenan Besuki	Analisis Faktor yang mempengaruhi IPM dengan variabel sektor kesehatan dan pendidikan	Regresi Data Panel	Pengaruh Pemerintah pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai $\alpha$ sebesar 5 persen. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dibidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai $\alpha$ sebesar 5%

Sumber: data diolah 2019

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis.

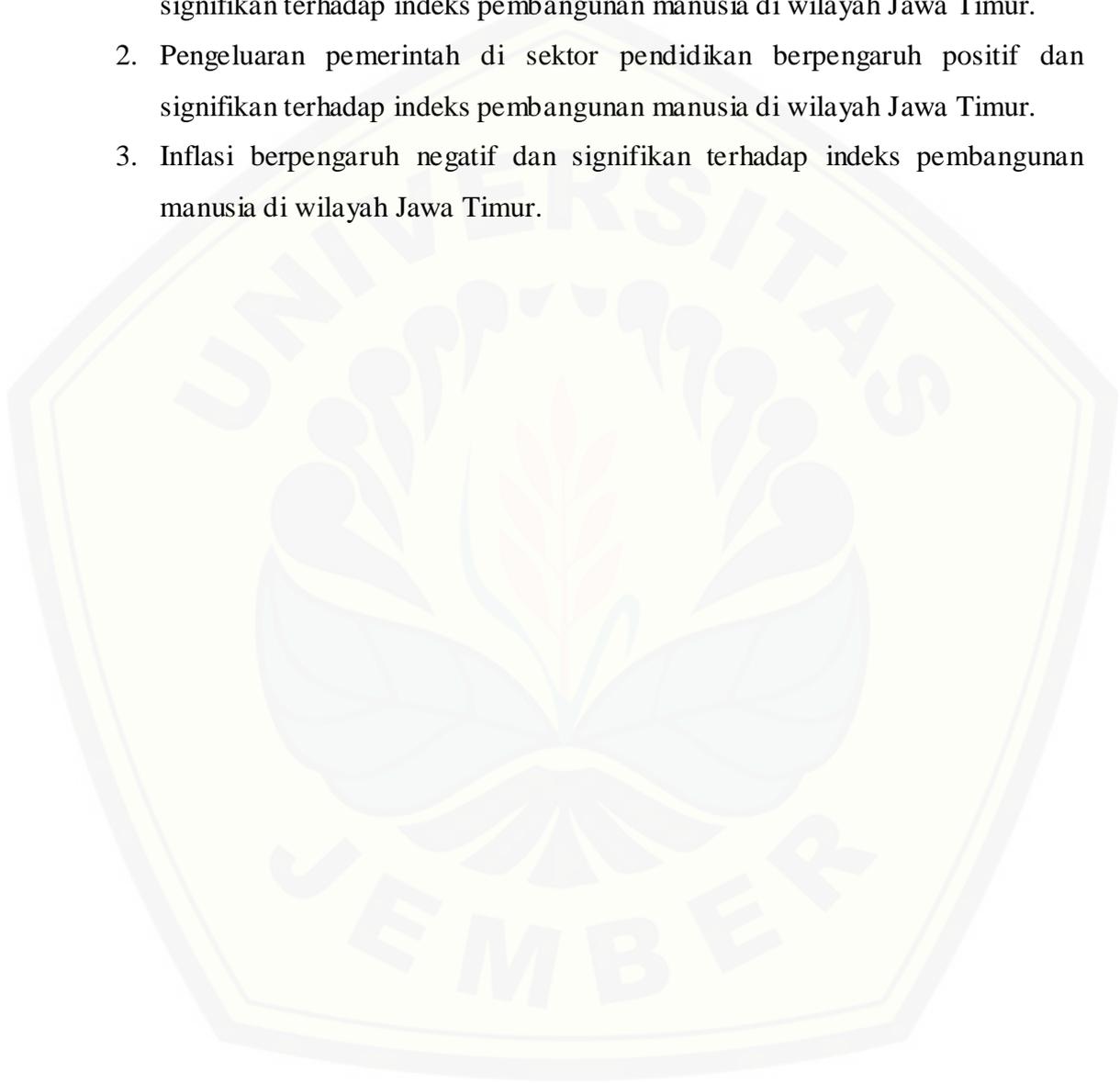


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Jawa Timur.
2. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Jawa Timur.
3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Jawa Timur.



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *eksplanatory research*, merupakan jenis penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh hubungan variable independen terhadap variable dependen yang dilakukan untuk menguji kebenaran secara statistik (Dajan, 2000).

#### 3.1.2 Waktu Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan jumlah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan serta inflasi mengalami tingkat fluktuasi sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur pada Tahun 2012 - 2017.

#### 3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder. Cakupan penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur yaitu 38 Kabupaten/Kota, dengan series data 5 tahun dari 2012 hingga tahun 2017. Data sekunder adalah data yang tersedia dan dapat diperoleh dari instansi yang terkait. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) berupa data Indeks Pembangunan Manusia, data pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan Inflasi di Jawa Timur.

### 3.2 Metode Analisis Data

#### 3.2.1 Analisis Data Panel

Menurut Gujaratidalam (Mirza, 2012), analisis data panel merupakan suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan antar

individu (*cross section*). Data *cross section* merupakan data yang diperoleh dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* merupakan data yang diperoleh dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Dalam melakukan estimasi dengan model regresi panel data terdapat 3 pendekatan yang sering digunakan, yaitu: metode *Pooled Ordinary Least Squared* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

1. *Pooled Ordinary Least Squared* (PLS)

Model *Pooled Ordinary Least Squared* suatu pendekatan yang sangat sederhana dalam mengolah data panel dengan menggunakan metode kuadrat kecil. Metode ini dikenal juga sebagai *Common Effect Model* (CEM). Pada metode ini, model mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama koefisien dari variabel-variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit *cross section*. Kelemahan dalam model PLS ini yaitu adanya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya, dimana kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain (Winarno, 2015).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan FEM menetapkan bahwa  $\alpha$  adalah sebagai kelompok yang spesifik/berbeda dalam *constant term* pada model regresinya. Formulasi yang biasa dipakai dalam model mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit dapat dilihat dalam perbedaan *constant term*.

3. *Random Effect Model* (REM)

Dalam metode REM perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section* (Nachrowi dan Usman, 2006).

### 3.2.2 Model Regresi Data Panel

Model regresi dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dan variabel bebas antara lain, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) dan pertumbuhan ekonomi (PE). Apabila ditulis dalam suatu fungsi matematis, sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PPS_{it} + \beta_2 PPD_{it} + \beta_4 IF_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PPS = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

PPD = Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

IF = Inflasi

$\varepsilon$  = *Error terms*

### 3.2.3 Uji Statistik

Evaluasi model estimasi berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan melakukan beberapa pengujian yang antara lain sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (*R-square*)

Winarno (2015) menyatakan bahwa model yang sudah dianalisis, harus diuji kualitasnya dengan menghitung koefisien determinasi yang dilambangkan dengan  $R^2$  (*R-square*). Nilai  $R^2$  selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin besar nilai  $R^2$ , semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen.

b. Uji F-Statistik

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji F mengikuti distribusi F dengan derajat bebas sebanyak (k-1) untuk numerator dan (n-k) untuk denominator, dimana k merupakan banyaknya

parameter termasuk konstanta, sedangkan  $n$  adalah banyaknya observasi (Widarjono, 2007 dalam Pratowo, 2012).

Nilai F-Statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan nilai F-Statistik yang rendah. Nilai Prob (F-Statistik) merupakan tingkat signifikansi marginal dari F-Statistik. Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - \frac{R^2}{N-1}}$$

Keterangan:

$k$  =Jumlah variable yang diestimasi termasuk konstanta.

$N$  =Jumlah observasi.

#### c. Uji t-Statistik

Tujuan digunakannya model uji t dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel terikat (Y) terhadap variabel bebas (X).

$$t_{hitung} = \frac{b}{sb}$$

Keterangan:

$b$  = Koefisien variabel bebas

$Sb$  = Standart deviasi

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel telah ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

##### a) Hipotesis pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

$H_0 = b_1 = 0$ , berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pemerintah sektor pendidikan, dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

$H_1 = b_1 \neq 0$ , berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pemerintah sektor pendidikan, dan inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika probabilitas  $t$  hitung  $\leq \alpha$  (0.05), dimana  $\alpha$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b) Jika probabilitas  $t$  hitung  $> \alpha$  (0.05), dimana  $\alpha$  merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### 3.2.4 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Winarno (2015) menyatakan bahwa salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Cara mengujinya dengan alat analisis dan Eviews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Sebenarnya normalitas data dapat dilihat dari gambar histogram, namun polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung.

- 1) Bila nilai Jarque-Bera tidak signifikan (lebih kecil dari 2) maka data berdistribusi normal.
- 2) Bila nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal (hipotesis nolnya adalah data berdistribusi normal).

#### b. Uji Multikolinearitas

Winarno (2015) menjelaskan mengenai multikolinearitas yaitu adanya hubungan linier antara variabel independen. Terjadinya multikolinearitas ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Nilai R-square ( $R^2$ ) tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.
2. Menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas.

3. Melakukan regresi untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen yang secara bersama-sama mempengaruhi satu variabel independen yang lain.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah multikolinieritas adalah membiarkan saja model kita mengandung multikolinieritas karena estimatornya masih dapat bersifat BLUE, menambah data baru, menghilangkan salah satu variabel independen, terutama yang memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel lain dan transformasi salah satu (atau beberapa) variabel termasuk misalnya dengan melakukan diferensi.

#### c. Uji Auto Korelasi

Winarno (2015) menyatakan bahwa autokorelasi adalah hubungan antara residual atau observasi dengan residual observasi lainnya. Data yang mengandung autokorelasi maka estimator yang didapatkan masih linier, tidak bias tetapi tidak mempunyai varian yang minimum (*no longer best*). Dengan demikian, seperti halnya pengaruh heteroskedastisitas, autokorelasi juga akan menyebabkan estimator hanya bersifat LUE, tidak lagi BLUE. Salah satu cara memeriksa adanya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson (DW).

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dasar dari metode regresi linier adalah varians tiap unsur *error* adalah suatu angka konstan yang sama atau homogen. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians tiap unsur *error* tidak konstan. Winarno (2015) menyatakan bahwa heteroskedastisitas dapat menyebabkan:

1. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (tidak lagi BEST), sehingga hanya memenuhi karakteristik LUE (Linear Unbiased Estimator). Meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linier dan tidak bias.
2. Perhitungan standard error tidak dapat lagi dipercaya kebenarannya karena varian tidak minimum. Varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien.

3. Uji hipotesis yang didasarkan pada uji t dan uji F tidak dapat lagi dipercaya, karena standard error-nya tidak dapat dipercaya.

Salah satu teknik pendugaan yang cocok jika terjadi heteroskedastisitas jika ragam sisaan diketahui adalah menggunakan metode kuadrat terkecil terboboti (WLS, *weighted least squares*) yang merupakan kasus khusus dari teknik ekonometrika yang lebih umum, yang disebut dengan GLS (*generalized least squares*).

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian. Pengertian penelitian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indeks pembangunan manusia (Y) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia yaitu: (a.) Dimensi umur panjang dan sehat indeks harapan hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, (b.) Indeks pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk (c.) Indeks pendapatan diukur dengan daya beli konsumsi perkapita.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X1) merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan kesehatan masyarakat per tahunnya. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam penelitian ini diukur nominalnya tahun 2012-2017.
3. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2) merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pendidikan masyarakat per tahunnya. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam penelitian ini diukur nominalnya tahun 2012-2017.
4. Laju inflasi tersebut dihitung berdasarkan angka indeks yang disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK) (BI, 2009)

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di 38 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2012 – 2017 berfokus pada pengaruh Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan Inflasi terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
3. Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

### 5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi masalah Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal yang perlu dilakukan. Perlunya kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan disetiap daerahnya.
2. Lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar semua variabel bebas bias meningkat pula, yang nantinya akan meningkatkan pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia.
3. Dikarenakan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), maka pemerintah diharapkan tetap meneruskan kebijakan memberikan bantuan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah atau miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayunanda, M., Ismaini, Z. 2013. *Analisis Staitistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel*. Jurnal Sains dan Seni Pomits.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur*. <http://www.bps.go.id> [ diakses pada tanggal 8 Januari 2019 ].
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur 2017*.<http://www.bps.go.id> [ diakses pada tanggal 8 Januari 2019 ]
- Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, Jakarta Badan Pusat Statistik, 2014
- Badan Pusat Statistik. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran 2016/2017*. (Pesawaran: Badan Pusat Statistik, 2017).h. 14
- Beik Syauqi Irfan. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Pdrb Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2003", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No 4 (Tahun 2015),h. 194.
- I Ketut Sudarsana, "Peningkatan Mutu Pendidikan luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Penjamin Mutu*(Denpasar 2016),h.1
- Jhingan, M.L, 2000, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Merwan Engineer, Iann King,. 2008. *The Human Development Index as a Criterion for optimal Planning*. Jurnal Indian Growth and Development Review: Emerald Insight
- Munawaroh. 2013. *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Kajian Ekonomi.

- Nyoman Lilya, Santika Dewi, I Ketut Sutrisna. "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3 No. 3 (Maret 2014), h.107.
- Patta, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Penuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor: Crestpent Press & Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahmawati Faturrohim. *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah) h.31
- Soekidjo Notoamodjo, "Kesehatan dan sumberdaya manusia". *Jurnal kesehatan masyarakat nasional* vol. 2, no. 5 (april 2008), h. 197
- Suparno H, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur". *Jurnal Ekonomika-Bisnis* Vol, 5.No. 1 (Januari 2014), h.22
- Todaro, M. P. dan Munandar, H. 2000. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Triwidodo. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer dan Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : STPM- YKPM.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*. ke-4. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Winarti, A. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2011*. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Winarti, Astri. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan Dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012". *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang, 2014

Zulfikar Mohamad.Y.L., 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*.



**LAMPIRAN****Lampiran 1 Hasil Analisis Data****COMMON EFFECT**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/03/19 Time: 21:24  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.69685	0.943819	72.78603	0.0000
X1	-0.002478	0.003794	-0.653154	0.5143
X2	-4.17E-06	1.73E-06	-2.407845	0.0169
X3	-0.300909	0.095006	-3.167261	0.0018
R-squared	0.189181	Mean dependent var		67.37338
Adjusted R-squared	0.174638	S.D. dependent var		5.587978
S.E. of regression	5.076647	Akaike info criterion		6.108865
Sum squared resid	5747.234	Schwarz criterion		6.184070
Log likelihood	-691.4106	Hannan-Quinn criter.		6.139208
F-statistic	13.00767	Durbin-Watson stat		0.069758
Prob(F-statistic)	0.000000			

## FIXED EFFECT

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/03/19 Time: 21:24  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.27664	0.455091	143.4366	0.0000
X1	0.010914	0.000979	11.14698	0.0000
X2	5.17E-07	6.58E-07	2.784538	0.0337
X3	-0.034971	0.054161	-0.645682	0.1931

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.969992	Mean dependent var	67.37338
Adjusted R-squared	0.963378	S.D. dependent var	5.587978
S.E. of regression	1.069368	Akaike info criterion	3.136834
Sum squared resid	212.6997	Schwarz criterion	3.768556
Log likelihood	-315.5991	Hannan-Quinn criter.	3.391715
F-statistic	146.6444	Durbin-Watson stat	1.908272
Prob(F-statistic)	0.000000		

## UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	130.805291	(37,186)	0.0000
Cross-section Chi-square	751.623068	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/03/19 Time: 21:24

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.69685	0.943819	72.78603	0.0000
X1	-0.002478	0.003794	-0.653154	0.5143
X2	-4.17E-06	1.73E-06	-2.407845	0.0169
X3	-0.300909	0.095006	-3.167261	0.0018
R-squared	0.189181	Mean dependent var		67.37338
Adjusted R-squared	0.174638	S.D. dependent var		5.587978
S.E. of regression	5.076647	Akaike info criterion		6.108865
Sum squared resid	5747.234	Schwarz criterion		6.184070
Log likelihood	-691.4106	Hannan-Quinn criter.		6.139208
F-statistic	13.00767	Durbin-Watson stat		0.069758
Prob(F-statistic)	0.000000			

## UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.751024	4	0.0126

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.010914	0.010789	0.000000	0.1395
X2	0.000001	0.000000	0.000000	0.1419
X3	-0.034971	-0.049527	0.000152	0.2384

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/03/19 Time: 21:25

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

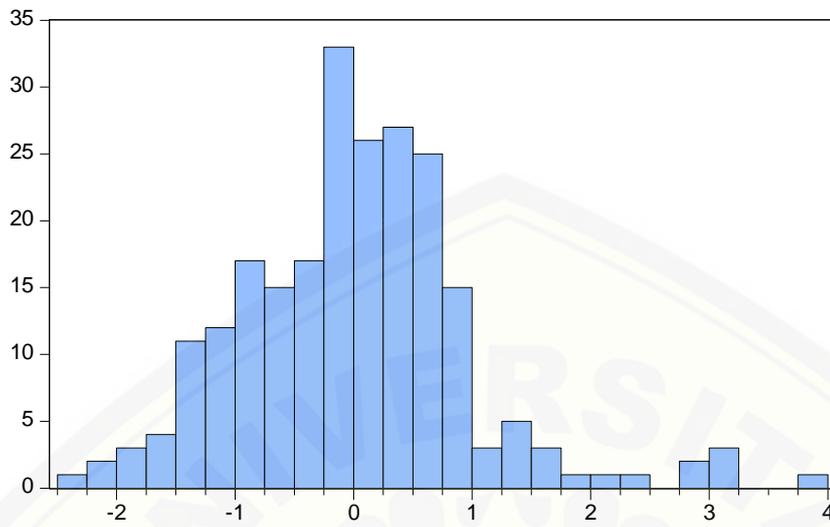
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.27664	0.455091	143.4366	0.0000
X1	0.010914	0.000979	11.14698	0.0000
X2	5.17E-07	6.58E-07	0.784538	0.4337
X3	-0.034971	0.054161	-0.645682	0.5193

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.969992	Mean dependent var	67.37338
Adjusted R-squared	0.963378	S.D. dependent var	5.587978
S.E. of regression	1.069368	Akaike info criterion	3.136834
Sum squared resid	212.6997	Schwarz criterion	3.768556
Log likelihood	-315.5991	Hannan-Quinn criter.	3.391715
F-statistic	146.6444	Durbin-Watson stat	0.908272
Prob(F-statistic)	0.000000		

UJI NORMALITAS



Series: Standardized Residuals	
Sample 2012 2017	
Observations 228	
Mean	-3.70e-17
Median	-0.010937
Maximum	3.750967
Minimum	-2.388244
Std. Dev.	0.967989
Skewness	0.663327
Kurtosis	4.747939
Jarque-Bera	45.74536
Probability	0.000000

UJI MULTIKOLINIERITAS

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.165727	-0.078448
X2	0.165727	1.000000	-0.128542
X3	-0.078448	-0.128542	1.000000

## UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/03/19 Time: 21:31  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.099154	0.247870	4.434394	0.0000
X1	-0.003083	0.000533	-1.178162	0.1412
X2	6.90E-07	3.59E-07	1.224755	0.1313
X3	-0.002891	0.029500	-0.098014	0.1220

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.336562	Mean dependent var	0.718158
Adjusted R-squared	0.190320	S.D. dependent var	0.647287
S.E. of regression	0.582443	Akaike info criterion	1.921651
Sum squared resid	63.09861	Schwarz criterion	2.553373
Log likelihood	-177.0682	Hannan-Quinn criter.	2.176532
F-statistic	2.301406	Durbin-Watson stat	1.457592
Prob(F-statistic)	0.000089		

## Lampiran 2 Rekapitulasi Data

No	Kab/Kota	Tahun	Bidang Kesehatan (Dalam Jutaan Rupiah)	Bidang Pendidikan (Dalam Jutaan Rupiah)	Inflasi (Dalam Persen)	IPM (Dalam Persen)
1	Kabupaten Pacitan	2012	72,944	416,924	17,53	61,14
2	Kabupaten Pacitan	2013	96,737	466,943	16,12	62,03
3	Kabupaten Pacitan	2014	110,999	490,439	15,93	62,94
4	Kabupaten Pacitan	2015	119,663	562,077	15,04	63,38
5	Kabupaten Pacitan	2016	145,98	614,845	14,73	63,81
6	Kabupaten Pacitan	2017	133,458	329,987	14,51	64,92
7	Kabupaten Ponorogo	2012	107,094	640,475	8,74	64,13
8	Kabupaten Ponorogo	2013	148,442	620,269	7,45	65,28
9	Kabupaten Ponorogo	2014	159,109	676,886	2,91	66,16
10	Kabupaten Ponorogo	2015	223,89	814,828	4,55	67,03
11	Kabupaten Ponorogo	2016	252,751	881,973	4,58	67,4
12	Kabupaten Ponorogo	2017	61,535	104,718	4,53	68,16
13	Kabupaten Trenggalek	2012	101,178	553,376	4,73	63,67
14	Kabupaten Trenggalek	2013	121,682	549,219	6,73	64,27
15	Kabupaten Trenggalek	2014	139,028	472,051	6,39	65,01
16	Kabupaten Trenggalek	2015	155,722	487,687	7,92	65,76
17	Kabupaten Trenggalek	2016	187,153	770,369	7,73	66,16
18	Kabupaten Trenggalek	2017	277,519	657,93	7,56	67,25
19	Kabupaten Tulungagung	2012	133,82	532,743	17,29	67,28
20	Kabupaten Tulungagung	2013	158,339	605,978	16,85	67,76
21	Kabupaten Tulungagung	2014	164,178	620,551	15,19	68,29
22	Kabupaten Tulungagung	2015	202,249	591,373	15,82	69,3
23	Kabupaten Tulungagung	2016	254,431	986,995	16,79	69,49
24	Kabupaten Tulungagung	2017	359,219	881,158	15,92	70,07
25	Kabupaten Blitar	2012	84,546	670,846	13,55	64,79
26	Kabupaten Blitar	2013	96,554	771,255	13,22	65,47
27	Kabupaten Blitar	2014	133,734	796,743	5,31	66,17
28	Kabupaten Blitar	2015	152,728	937,506	5,23	66,49
29	Kabupaten Blitar	2016	182,316	994,954	6,76	66,88
30	Kabupaten Blitar	2017	269,014	874,57	6,68	68,13
31	Kabupaten Kediri	2012	148,907	632,5	5,25	66,24
32	Kabupaten Kediri	2013	163,769	755,409	5,45	66,84
33	Kabupaten Kediri	2014	242,661	782,779	5,91	67,29
34	Kabupaten Kediri	2015	308,4	858,878	6,61	68,01
35	Kabupaten Kediri	2016	292,635	994,033	6,72	68,44
36	Kabupaten Kediri	2017	170,062	626,669	6,67	68,91
37	Kabupaten Malang	2012	153,131	810,867	9,29	63,47
38	Kabupaten Malang	2013	170,324	752,25	10,16	63,97

39	Kabupaten Malang	2014	185,96	787,855	10,39	64,71
40	Kabupaten Malang	2015	246,984	1199,974	11,26	65,2
41	Kabupaten Malang	2016	319,966	1272,768	11,36	65,59
42	Kabupaten Malang	2017	474,792	1146,385	11,29	66,63
43	Kabupaten Lumajang	2012	107,056	561,957	8,2	59,62
44	Kabupaten Lumajang	2013	125,604	544,505	7,71	60,72
45	Kabupaten Lumajang	2014	159,431	659,998	6,97	61,31
46	Kabupaten Lumajang	2015	188,891	690,459	6,01	61,87
47	Kabupaten Lumajang	2016	229,108	798,642	4,01	62,33
48	Kabupaten Lumajang	2017	175,338	675,205	4,22	63,02
49	Kabupaten Jember	2012	204,949	907,559	3,62	59,94
50	Kabupaten Jember	2013	227,944	1.050.270	4,23	60,64
51	Kabupaten Jember	2014	300,305	1.186.384	3,75	61,31
52	Kabupaten Jember	2015	436,438	1.165.439	3,17	62,43
53	Kabupaten Jember	2016	506,495	1.276.405	3,86	62,64
54	Kabupaten Jember	2017	124,426	1.316.404	3,78	63,04
55	Kabupaten Banyuwangi	2012	184,293	344,766	5,94	64,54
56	Kabupaten Banyuwangi	2013	154,041	816,841	6,4	65,48
57	Kabupaten Banyuwangi	2014	191,542	809,353	6,96	66,12
58	Kabupaten Banyuwangi	2015	242,064	920,889	7,3	66,74
59	Kabupaten Banyuwangi	2016	316,597	1.012.134	7,13	67,31
60	Kabupaten Banyuwangi	2017	391,129	1.103.380	7,04	68,08
61	Kabupaten Bondowoso	2012	110,532	445,957	4,73	59,47
62	Kabupaten Bondowoso	2013	116,703	443,122	4,71	60,46
63	Kabupaten Bondowoso	2014	125,381	508,402	4,51	62,24
64	Kabupaten Bondowoso	2015	140,276	573,362	4,55	63,21
65	Kabupaten Bondowoso	2016	204,889	637,744	4,09	63,43
66	Kabupaten Bondowoso	2017	260,757	690,216	4,12	63,95
67	Kabupaten Situbondo	2012	98,28	383,581	4,62	60,07
68	Kabupaten Situbondo	2013	111,159	440,418	4,66	60,82
69	Kabupaten Situbondo	2014	127,818	488,79	4,97	62,23
70	Kabupaten Situbondo	2015	172,683	612,741	4,51	63,43
71	Kabupaten Situbondo	2016	227,263	615,759	4,86	63,91
72	Kabupaten Situbondo	2017	280,367	548,034	4,75	64,53
73	Kabupaten Probolinggo	2012	89,936	488,613	6,2	59,83
74	Kabupaten Probolinggo	2013	126,43	550,373	5,83	60,3
75	Kabupaten Probolinggo	2014	152,839	578,998	5,93	61,33
76	Kabupaten Probolinggo	2015	195,087	636,727	8,39	62,61
77	Kabupaten Probolinggo	2016	245,351	695,302	8,06	63,04
78	Kabupaten Probolinggo	2017	304,337	635,666	8,15	63,83
79	Kabupaten Pasuruan	2012	141,347	676,572	7,03	60,79

80	Kabupaten Pasuruan	2013	154,635	701,494	6,59	61,43
81	Kabupaten Pasuruan	2014	208,454	843,215	6,75	62,31
82	Kabupaten Pasuruan	2015	208,454	935,139	7,04	63,74
83	Kabupaten Pasuruan	2016	262,342	959,994	6,66	64,35
84	Kabupaten Pasuruan	2017	262,342	865,069	6,55	65,04
85	Kabupaten Sidoarjo	2012	246,609	710,391	7,77	73,75
86	Kabupaten Sidoarjo	2013	342,967	787,519	6,86	74,48
87	Kabupaten Sidoarjo	2014	433,261	853,947	6	75,14
88	Kabupaten Sidoarjo	2015	524,133	1087,412	6,07	76,39
89	Kabupaten Sidoarjo	2016	615,005	1320,877	6,48	76,78
90	Kabupaten Sidoarjo	2017	678,104	1078,235	6,31	77,43
91	Kabupaten Mojokerto	2012	85,674	440,07	6,03	68,14
92	Kabupaten Mojokerto	2013	122,996	457,831	4,65	68,71
93	Kabupaten Mojokerto	2014	146,649	489,611	3,08	69,17
94	Kabupaten Mojokerto	2015	230,596	730,631	3,54	69,84
95	Kabupaten Mojokerto	2016	268,857	845,634	3,99	70,22
96	Kabupaten Mojokerto	2017	309,484	689,683	3,82	70,85
97	Kabupaten Jombang	2012	155,122	535,398	7,77	66,2
98	Kabupaten Jombang	2013	179,395	587,419	6,86	66,84
99	Kabupaten Jombang	2014	221,379	594,721	6	67,82
100	Kabupaten Jombang	2015	271,677	825,27	6,07	68,63
101	Kabupaten Jombang	2016	317,39	881,218	6,48	69,07
102	Kabupaten Jombang	2017	420,159	793,79	6,39	69,59
103	Kabupaten Nganjuk	2012	147,072	561,4	7,77	65,6
104	Kabupaten Nganjuk	2013	175,046	549,303	6,86	66,58
105	Kabupaten Nganjuk	2014	214,686	838,489	6	68,07
106	Kabupaten Nganjuk	2015	265,325	647,448	6,07	68,98
107	Kabupaten Nganjuk	2016	310,234	922,071	6,48	69,59
108	Kabupaten Nganjuk	2017	411,397	851,397	6,38	69,9
109	Kabupaten Madiun	2012	94,384	476,718	8,45	64,87
110	Kabupaten Madiun	2013	99,029	504,11	8,93	65,98
111	Kabupaten Madiun	2014	126,198	553,067	17,53	67,32
112	Kabupaten Madiun	2015	170,257	598,648	16,12	68,07
113	Kabupaten Madiun	2016	194,564	665,208	15,93	68,6
114	Kabupaten Madiun	2017	43,917	98,511	15,99	69,39
115	Kabupaten Magetan	2012	101,612	439,976	13,42	67,58
116	Kabupaten Magetan	2013	119,428	546,5	10,86	68,52
117	Kabupaten Magetan	2014	124,596	607,297	8,74	69,56
118	Kabupaten Magetan	2015	172,136	663,007	7,45	69,86
119	Kabupaten Magetan	2016	180,854	763,762	7,91	70,29
120	Kabupaten Magetan	2017	66,948	90,652	7,81	71,39

121	Kabupaten Ngawi	2012	39,039	84,925	5,01	64,52
122	Kabupaten Ngawi	2013	110,764	562,406	4,98	65,84
123	Kabupaten Ngawi	2014	131,35	639,528	4,73	66,72
124	Kabupaten Ngawi	2015	160,827	728,282	6,73	67,25
125	Kabupaten Ngawi	2016	190,304	817,035	6,39	67,78
126	Kabupaten Ngawi	2017	232,235	1055,464	6,41	68,32
127	Kabupaten Bojonegoro	2012	126,538	682,1	8,24	62,19
128	Kabupaten Bojonegoro	2013	170,535	735,958	9,12	63,22
129	Kabupaten Bojonegoro	2014	231,349	839,952	17,29	64,2
130	Kabupaten Bojonegoro	2015	323,009	945,949	16,85	64,85
131	Kabupaten Bojonegoro	2016	417,421	1068,51	15,19	65,27
132	Kabupaten Bojonegoro	2017	42,976	55,966	15,12	66,17
133	Kabupaten Tuban	2012	124,929	579,424	14,81	61,33
134	Kabupaten Tuban	2013	136,051	602,511	13,89	62,47
135	Kabupaten Tuban	2014	154,385	674,884	13,55	63,36
136	Kabupaten Tuban	2015	175,687	714,321	13,22	64,14
137	Kabupaten Tuban	2016	244,488	835,655	13,31	64,58
138	Kabupaten Tuban	2017	299,785	747,917	13,28	65,52
139	Kabupaten Lamongan	2012	121,602	624,655	5,67	65,4
140	Kabupaten Lamongan	2013	155,35	692,144	5,8	66,21
141	Kabupaten Lamongan	2014	172,573	721,601	5,25	67,51
142	Kabupaten Lamongan	2015	201,433	781,169	5,45	68,9
143	Kabupaten Lamongan	2016	325,71	175,555	5,91	69,42
144	Kabupaten Lamongan	2017	59,314	114,48	5,75	69,84
145	Kabupaten Gresik	2012	173,664	465,901	7,36	69,9
146	Kabupaten Gresik	2013	185,572	516,099	8,73	71,11
147	Kabupaten Gresik	2014	277,137	567,829	9,29	72,12
148	Kabupaten Gresik	2015	316,225	610,674	10,16	72,47
149	Kabupaten Gresik	2016	388,052	703,582	10,39	72,84
150	Kabupaten Gresik	2017	434,791	672,381	10,21	73,57
151	Kabupaten Bangkalan	2012	98,642	547,552	9,66	57,23
152	Kabupaten Bangkalan	2013	133,753	508,449	8	58,63
153	Kabupaten Bangkalan	2014	181,759	526,901	8,2	59,65
154	Kabupaten Bangkalan	2015	290,505	605,59	7,71	60,19
155	Kabupaten Bangkalan	2016	287,247	668,727	6,97	60,71
156	Kabupaten Bangkalan	2017	358,57	673,291	6,87	61,49
157	Kabupaten Sampang	2012	102,066	418,201	6,61	54,49
158	Kabupaten Sampang	2013	125,548	536,37	6,72	55,17
159	Kabupaten Sampang	2014	134,642	637,661	6,65	55,78
160	Kabupaten Sampang	2015	187,04	679,873	6,48	56,45
161	Kabupaten Sampang	2016	239,438	722,084	7,04	56,98

162	Kabupaten Sampang	2017	258,937	623,525	7,01	58,18
163	Kabupaten Pamekasan	2012	102,066	418,201	6,61	59,37
164	Kabupaten Pamekasan	2013	125,548	536,37	6,72	60,42
165	Kabupaten Pamekasan	2014	134,642	637,661	6,65	61,21
166	Kabupaten Pamekasan	2015	187,04	679,873	6,48	62,27
167	Kabupaten Pamekasan	2016	239,438	722,084	7,04	62,66
168	Kabupaten Pamekasan	2017	258,937	623,525	7,02	63,1
169	Kabupaten Sumenep	2012	101,785	517,063	5,88	57,27
170	Kabupaten Sumenep	2013	133,262	551,843	4,61	58,7
171	Kabupaten Sumenep	2014	168,311	677,761	4,73	60,08
172	Kabupaten Sumenep	2015	196,659	677,761	4,71	60,84
173	Kabupaten Sumenep	2016	275,712	645,165	4,51	61,43
174	Kabupaten Sumenep	2017	354,765	614,798	4,44	62,38
175	Kota Kediri	2012	151,221	246,767	4,47	72,2
176	Kota Kediri	2013	176,288	288,025	4,58	72,93
177	Kota Kediri	2014	201,992	330,231	4,62	73,66
178	Kota Kediri	2015	225,848	364,617	4,66	74,18
179	Kota Kediri	2016	257,914	408,835	4,97	74,62
180	Kota Kediri	2017	60,381	61,278	4,81	75,67
181	Kota Blitar	2012	64,67	167,259	5,89	72,56
182	Kota Blitar	2013	71,005	181,988	6,75	73,08
183	Kota Blitar	2014	86,255	222,894	6,2	73,53
184	Kota Blitar	2015	89,116	243,247	5,83	74,53
185	Kota Blitar	2016	131,19	288,451	5,93	75,26
186	Kota Blitar	2017	172,065	247,11	5,85	76
187	Kota Malang	2012	69,133	430,31	7,59	76,69
188	Kota Malang	2013	80,384	512,812	7,65	77,36
189	Kota Malang	2014	128,51	599,661	7,03	78,04
190	Kota Malang	2015	134,957	613,245	6,59	78,44
191	Kota Malang	2016	141,403	626,83	6,75	78,96
192	Kota Malang	2017	147,85	640,414	6,7	80,05
193	Kota Probolinggo	2012	81,824	194,52	4,57	67,3
194	Kota Probolinggo	2013	78,301	197,114	5,85	68,14
195	Kota Probolinggo	2014	92,889	214,697	7,77	68,93
196	Kota Probolinggo	2015	108,12	253,45	6,86	70,05
197	Kota Probolinggo	2016	131,967	311,367	6	70,49
198	Kota Probolinggo	2017	115,424	211,931	6,01	71,01
199	Kota Pasuruan	2012	53,241	147,675	6,79	69,69
200	Kota Pasuruan	2013	50,381	151,003	6,7	70,41
201	Kota Pasuruan	2014	72,014	158,341	6,03	72,01
202	Kota Pasuruan	2015	91,415	206,171	4,65	72,89

203	Kota Pasuruan	2016	130,297	221,608	3,08	73,23
204	Kota Pasuruan	2017	154,479	194,986	3,02	73,78
205	Kota Mojokerto	2012	90,384	96,552	2,93	72,78
206	Kota Mojokerto	2013	110,67	121,97	3,19	73,47
207	Kota Mojokerto	2014	100,37	159,578	2,77	74,2
208	Kota Mojokerto	2015	123,767	170,425	2,69	74,91
209	Kota Mojokerto	2016	177,782	205,481	2,74	75,04
210	Kota Mojokerto	2017	39,982	38,107	4,71	75,54
211	Kota Madiun	2012	40,807	215,076	4,41	75,98
212	Kota Madiun	2013	55,078	254,106	4,77	76,48
213	Kota Madiun	2014	89,186	298,719	4,66	77,21
214	Kota Madiun	2015	112,636	337,862	4,02	78,41
215	Kota Madiun	2016	110,917	448,126	3,81	78,81
216	Kota Madiun	2017	174,933	384,552	3,74	79,48
217	Kota Surabaya	2012	557,293	1544,994	2,74	77,2
218	Kota Surabaya	2013	716,914	1470,439	3,02	77,62
219	Kota Surabaya	2014	693,756	1518,768	2,74	78,05
220	Kota Surabaya	2015	740,273	2047,458	3,62	78,51
221	Kota Surabaya	2016	892,09	1847,312	3,99	78,87
222	Kota Surabaya	2017	946,84	1889,031	3,87	79,47
223	Kota Batu	2012	20,772	134,057	3,81	68,66
224	Kota Batu	2013	20,26	149,539	3,84	69,76
225	Kota Batu	2014	24,184	153,25	3,99	70,62
226	Kota Batu	2015	27,591	182,529	3,89	71,55
227	Kota Batu	2016	32,351	213,948	4,04	71,89
228	Kota Batu	2017	31,928	208,143	4,01	72,62